BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan

Saya telah melaksanakan KKL di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat dengan baik dan lancar, dan sebagai pengalaman saya sebelum terjun ke dunia kerja.

Pada hari pertama KKL, saya melakukan aktivitas kerja biasa seperti para PNS. kegiatan saya adalah semua hal yang berhubungan dengan substansi judul. Saya melaksanakan semua perintah dari pegawai dengan baik dan lancar.

Dibawah ini adalah semua kegiatan yang saya lakukan ketika melaksanakan KKL di BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan KKL

No	Waktu	Jenis Kegiatan
01	09-07-2012	Memproses surat pemanggilan atau undangan peserta diklat (fax).
02	10-07-2012	Mengarsipkan surat-surat masuk dan surat keluar.
03	11-07-2012	Merapihkan arsip-arsip surat dari tahun dari tahun 2010-sekarang, berdasarkan kode surat.
04	12-07-2012	Mendata nama peserta TPD yang akan dilatih.
05	13-07-2012	Menyiapkan daftar hadir dan alat tulis kantor untuk peserta diklat.
06	16-07-2012	Perbanyak materi diklat dan menyiapkan alat tulis kantor untuk di kelas.
07	17-07-2012	Menyimak proses belajar mengajar di kelas.
08	18-07-2012	Membantu hasil penilaian peserta Diklat (Evaluasi)

09	19-07-2012	Membuat sertifikat peserta Diklat.
10	20-07-2012	Membantu menyusun laporan Diklat.
11	23-07-2012	Mendata barang-barang inventaris milik negara sesuai dengan penempatan ruang.
12	24-07-2012	Mengecek barang-barang milik negara yang sudah tidak layak pakai.
13	25-07-2012	Mempelajari program unit akuntansi kuasa pengguna barang.
14	26-07-2012	Evaluasi fasilitas Diklat dan perpustakaan.
15	27-07-2012	Evaluasi pemeliharaan fasilitas Diklat dan kebersihan kamar.
16	30-07-2012	Evaluasi kelancaran penyelenggaraan Diklat
17	31-07-2012	Evaluasi efektivitas program KKB bagi TPD/TPK.

. Pengalaman saya ketika melaksanakan praktek kerja diharapkan menjadikan saya lebih dewasa di dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Karena setelah lulus kuliah nanti, saya harus bekerja keras untuk dapat berguna bagi masyarakat luas.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan KKL ini, seperti kepala BKKBN, para pegawai BKKBN, Seluruh Dosen IP Unikom dan Dosen Pembimbing. Dan teman-teman IP Unikom.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Efektivitas Diklat Program KKB Bagi TPD/TPK

Berbicara mengenai efektivitas diklat, maka kita akan mengukurnya berdasarkan tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah pertama, adanya sejumlah sasaran yang hendak dicapai. Kedua, perencanaan dalam mencapai sasaran. Ketiga, proses dalam mewujudkan tujuan atau sasaran tersebut.

TPD/TPK yang diterjunkan langsung ke masyarakat dalam mensosialisasikan program KKB berjumlah 3.000 orang yang tersebar di

seluruh wilayah Jawa Barat dan merupakan orang-orang yang berkompeten mengidentifikasi area permasalahan di lapangan, penentuan prioritas dan substansi. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik karena pokok-pokok pengelolaan pendidikan dan pelatihan dikembangkan sesuai dengan permintaan, kebutuhan, dan keinginan calon peserta KB. Pemberdayaan masyarakat melalui program KB ini sangat berguna bagi masyarakat agar dapat mengatasi masalah-masalah kependudukan.

Materi-materi yang pelajari oleh TPD/TPK ketika melaksanakan Diklat adalah, panduan standard, kurikulum, bahan pembelajaran, media dan paket-paket pelatihan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan program berbasis kompetensi. Pengembagan sarana dan prasarana diklat.

Berdasarkan pengamatan penulis ketika melakukan KKL di BKKBN Provinsi Jawa Barat maka dapat penulis simpulkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan bagi TPD/TPK untuk program KKB sangat efektif karena kompetensi dan kualitas SDM yang dimiliki TPD/TPK sangat mumpuni untuk mencapai tujuan program KKB.

Keberhasilan Program KB Nasional di Provinsi Jawa Barat, salah satu indikatornya adalah kemampuan TPD/TPK yang profesional. Dan memiliki integritas yang tinggi dalam membawa misi program KB Nasional. Kemampuan TPD/TPK dalam melakukan pengembangan isi pesan pada saat diklat tidak terlepas dari adanya pengendalian operasional yang dilakukan oleh petugas itu sendiri serta oleh staf kantor BKKBN Provinsi Jawa Barat.

3.2.1.1 Sasaran Program KKB Nasional

Tiga sasaran Operasional Program KKB yaitu :

1. Sasaran utama adalah Pasangan Usia Subur (PUS), dengan prioritas garapan melalui segmentasi sasaran sesuai dengan pola reproduksi sehat yaitu usia PUS wanita kurang dari 20 tahun, Penundaan Anak Pertama (PAP) sampai usia 20 tahun lebih, dengan menggunakan

alat/obat kontrasepsi efektif suntik/pil atau kondom. Bagi PUS wanita usia 20 tahun sampai 30 tahun dipersilahkan hamil dan mengatur kehamilannya dengan prinsip hanya memiliki satu balita. Bagi usia PUS wanita lebih dari 30 tahun stop untuk hamil karena memasuki Resiko Tinggi Kematian Ibu dan Bayi lahir hidup.

2. Sasaran Antara adalah stakeholder, yaitu para pemegang kebijakan sebagai tokoh penentu baik aspek politis, budaya dan pelaku medis dalam melayani PUS yang ingin ber-KB.

   Untuk meningkatkan kapasitas stakeholder tersebut dilakukan advokasi, latihan keterampilan tertentu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan teknis medis bagi pelaku medis (Dokter dan Bidan).

3. Sasaran umum adalah masyarakat, yaitu segenap lapisan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam operasional program KB di lapangan misalnya para tokoh informal, LSM/IMP dll dengan prinsip kemitraan yang terbuka dan saling menguntungkan.

3.2.1.2 Tujuan Diklat Program KKB Bagi TPD/TPK

Banyak sekali tujuan yang ingin dicapai di dalam diklat ini, dibawah ini adalah tujuan diadakannya diklat program KKB bagi TPD/TPK, sebagai berikut :

1. Tersampaikannya informasi teknis maupun politis yang berkaitan dengan pengelolaan program KB atau program-program pembangunan pembangunan lainnya kepada pengelola program di Desa.
2. Terbentuknya kesepakatan operasional dari berbagai unsur terkait dalam pelaksanaan program KB di daerah.
3. Berlangsungnya pengelolaan program KB secara terencana, terstruktur dan terus menerus.
4. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini peserta memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengelolaan KB di Desa/Kelurahan.

5. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan peserta memiliki wawasan tentang perkembangan program KKB.
6. Memahamai tugas, fungsi dan peran sebagai TPD/TPK.
7. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang pengelolaan program KKB.
8. Memiliki sikap kerjasama dan kemitraan pengelolaan program KKB.

3.2.1.3 Hasil Diklat Program KKB Bagi TPD/TPK

Hasil Diklat ini merupakan tahap persiapan dan pelaksanaan Tenaga Penggerak Desa/Tenaga Penggerak Kelurahan (TPD/TPK) ketika melaksanakan Pendidikan dan pelatihan program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB).

1. Tahap Persiapan.
   a. Rapat persiapan
   b. Penyusunan jadwal pelatihan
   c. Penyiapan bahan materi, ATK dan peralatan.
   d. Pembagian pengajar
2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan.

Tahap pelaksanaan merupakan teknik operasional lapangan atau pola kerja dan metode penggarapan program KB di tingkat Kelurahan atau Desa. Berikut tahap pelaksanaannya.

a. Proses pelatihan diawali dengan pembukaan oleh Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat.
b. Penjajakan awal terhadap pengetahuan peserta melalui test, yang hasilnya menjadi bahan masukan bagi Widyaiswara/Narasumber dalam menyampaikan materi.
c. Mengawali kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dinamika kelompok dengan tujuam menyiapkan sikap dan mental untuk belajar saling mengenal antara peserta.
d. Penyampaian materi oleh Widyaiswara bersama Narasumber.
e. Untuk mengetahui keberhasilan pendidikan dan pelatihan, setelah semua materi tersampaikan dilaksanakan evaluasi.

Dan perlu diingat bahwa setiap peserta diklat dalam hal ini TPD/TPK dapat memahami rencana operasional yang akan dilaksanakan, setiap peserta merasa berkepentingan dan merasa saling diuntungkan apabila rencana operasional KB dilaksanakan, setiap peserta merasa dirinya bekerja sebagai suatu tim kerja, setiap peserta memiliki keyakinan dan kesungguhan bahwa pelaksanaan operasional dapat dilaksanakan.

Dibawah ini merupakan materi-materi atau bahan ketika para TPD/TPK melaksanakan diklat program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Pokok-pokok pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan seperti yang tercantum pada sub-sistem diklat, meliputi: manajemen pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kualitas institusi diklat, pengembangan program diklat dan pembinaan pengelolaan kediklatan.

1. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan.

   Institusi diklat mempunyai tanggung jawab menyiapkan SDM pengelola dan pelaksana program KB dalam hal ini TPD/TPK yang kompeten dan professional dalam melaksanakan program KB. Dalam mengelola program kediklatan, institusi diklat tersebut harus dapat memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan perkembangan program, kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi sebagai teknologi pembelajaranm khususnya dalam mewujudkan visi program KB yaitu “Keluarga Berkualitas tahun 2015”.

Proses pengelolaan diklat merupakan suatu siklus/tahap yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yang terdiri dari:

a. Tahap pertama : melakukan penjajakan atau identifikasi kebutuhan pelatihan *(need assessment*) yang bertujuan untuk mencari kesenjangan antara kompetensi yang ada dengan SDM yang dibutuhkan.
b. Tahap kedua : menyusun desain pelatihan yang dibutuhkan sesuai hasil analisa penjajakan kebutuhan. Pada penyusunan desain pelatihan ditentukan tujuan program pelatihan, kerangka model/metoda (orientasi, lokakarya, magang, *on the job training, coaching*, dll) dan strategi pelatihan yang sesuai, pengorganisasian pelatihan dan pendanaan.

c. Tahap ketiga : membuat rancangan pembelajaran yang meliputi perkembangan kurikulum, bahan, media, instrument evaluasi, dan metoda pembelajaran. Rancangan pembelajaran dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   - Pembelajaran berbasis kepada peserta dan kelompok *(partisipatory/ peer based training)*
   - Mencari dan mengetahui hal-hal yang mutakhir dan sedang menjadi topik pembicaraan (*discovery*)
   - Belajar melalui *eksperimen* (*experimental learning*)
   - Belajar berbasis *website (website online learning)*

d. Tahap keempat : menyelenggarakan pelatihan dimulai dari pemanggilan peserta yang disesuaikan dengan prosedur berlaku dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metoda dan media sesuai rancangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
   - Fasilitator adalah orang-orang yang memiliki kompetensi standar (mampu menguasai kelas, menyajikan materi dengan baik dan menarik, meguasai teknologi pendidikan, mampu berkomunikasi dengan baik, dapat menghidupkan suasana belajar, kaya dengan contoh-contoh, alternatif dan ilustrasi sesuai dengan materi yang diberikan)
   - Suasana kelas sangat kondusif dan tidak kaku
   - Siap dengan *energizer*
   - Alokasi waktu disesuaikan dengan tujuan pengajaran.

e. Tahap kelima : melakukan evaluasi pelatihan baik yang bersifat formatif maupun sumatif terhadap peserta, fasilitator dan penyelenggaraan, serta evaluasi pasca pelatihan untuk memantau tenaga yang sudah dilatih. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk melihatdampak diklat terhadap kinerja SDM yang sudah dilatih serta dampak kinerja SDM terhadapkemajuan operasional program.

Proses pengelolaan diklat ini dilaksanakan dengan memperhatikan 5 (lima) elemen yang berperan dalam mendorong terciptanya organisasi

pembelajaran *(learning organization*) yaitu: proses dan tipe belajar *(learning*); perkembangan organisasi (BKKBN atau lembaga yang menangani program KB di kabupaten/kota); SDM pengelola dan pelaksana program termasuk tokoh masyarakat, institusi masyarakat pedesaan (IMP) serta keluarga sebagai klien; perkembangan pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan dan mendukung proses belajar. Model LO seperti ini mengacu kepada model yang diperkenalkan oleh *Marquardt.*

Elemen learning merupakan elemen inti yang terjadi pada individu, kelompok dan organisasi,sedangkan elemen lainnya organisasi, SDM, pengetahuan dan teknologi dibutuhkan untukmengembangkan kelangsungan proses belajar dan menyempurnakan kualitas organisasi belajar.Terjadinya organisasi belajar akan mendorong SDM pengelola dan pelaksana program KB untuk belajar, berfikir kritis, serta membantu organisasi, belajar dari kesalahan dan keberhasilan sehingga dapat mengadaptasi perubahan lingkungan secara efektif.

2. Peningkatan Kualitas Institusi Diklat

   Kualitas Institusi Diklat ditentukan oleh kualitas dan profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana diklat, sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan program diklat serta terjaringnya jejaring kerja dan forum komunikasi dengan mitra. Karena itu, peningkatan kualitas institusi diklat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

   a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM struktural maupun fungsional pada Institusi Diklat tingkat Pusat dan Provinsi sehingga menjadi SDM yang dapat merubah pola pikir sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang reguler serta menerapkan *Learning Organization* di lingkungan institusi diklat.
   b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran sesuai perkembangan teknologi terutama media pembelajaran, sarana dan alat bantu yang kondusif untuk proses pembelajaran.

c. Mengembangkan jejaring kerja dan forum komunikasi yang inovatif sebagai wahana diklat sesuai perkembangan program dan kebutuhan sasaran *(stakeholders* dan *users*) baik untuk diklat internasional, nasional dan lokal. Jejaring kerja dan kemitraan dapat dijalin dengan perguruan tinggi, LSM, badan diklat daerah dan lembaga pendidikan lainnya.

3. Pengembangan Program Diklat

Program-program kediklatan perlu dikemas secara inovatif dan kreatif dengan memperhatikan kebutuhan sasaran sesuai hasil *need asessment*, perkembangan program, dengan menggunakan teknologi yang memadai agar tercapai tujuan yang diharapkan serta mudah untuk dipasarkan.

a. Mengembangkan model organisasi belajar di lingkungan unit-unit kerja baik di pusat, provinsi melalui fasilitasi dan pendampingan *(stewardship*).
b. Mengembangkan program diklat yang berkaitan dengan perkembangan program KB dankependudukan serta program pembangunan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sertayang dibutuhkan daerah.

Pengembangan program diklat yang dilaksanakan di pusat meliputi:

a) Pengembangan panduan, kurikulum, dan bahan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengantuntutan perkembangan program. Misalnya program KB dan kependudukan, perspektif genderdalam program KB dan KR, keterikatkan program KB dengan aspek pembangunan lainnya,manajemen program KB paradigma baru.
b) Pengembangan modul standar yang dapat dikembangkan oleh institusi diklat daerah sesuaikondisi wilayah.
c) Pengembangan prototipe media pembelajaran pembelajaran yang dapat dikembangkan didaerah.
d) Pengembangan model dan jenis pelatihan sesuai hasil need assessment yang dilakukan minimalenam bulan sebelum pelaksanaan pelatihan, diklat percontohan, pendidikan jarak jauh.

e) Jenis pelatihan yang diselenggarakan di pusat difokuskan kepada pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) dan TOT serta pelatihan lain yang bertujuan menyiapkan kemandirian intsitusi diklatprovinsi serta kemitraan dengan sektor lain di pusat.

Pengembangan program diklat yang dilaksanakan di institusi diklat daerah (provinsi) adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan program diklat yang mencerminkan spesifik daerah sesuai dengan hasil need assessment yang telah dilakukan oleh institusi diklat di wilayah masing-masing denganmelibat lembaga yang menangani Program Kependudukan/KB di kabupaten/kota. Model pelatihannya dapat dalam bentuk orientasi, diklat percontohan, magang, laboratorium diklat, pendidikan jarak jauh.
b) Pengembangan modul pembelajaran sesuai kebutuhan daerah. Pengembangan modul yangtelah disusun oleh pusat atau dikembangkan sendiri sesuai karakteristik daerah.
c) Pengembangan panduan, kurikulum, media dan bahan pembelajaran yang disesuaikandengan perkembangan program KB dan kependudukan di daerah masing-masing.
d) Pemasaran program pelatihan strategis yang berkaitan dengan program kependudukan, KBKR serta program pelatihan strategis lainnya sesuai kebutuhan *stakeholders* di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seperti *strategic planning*, *strategic leadership* dan *learning organization* (LO), *logical frame work*, pengembangan potensi diri, diklat dasar umum bagi PKB, pembentukan karakter sejak dini (PKSD), pengaruh utama gender dan lain-lain.
e) Jenis pelatihan yang dikembangkan di provinsi atau di kabupaten/kota (melalui fasilitas institusi diklat provinsi) adalah sebagai berikut:
    [1] Diklat perjenjangan (Diklatpim tingkat III dan IV) dan manajemen seperti pelatihan manajemen terpadu bagi pejabat kabupaten/kota yang menangani program kependudukan dan KB.

[2] Pelatihan teknis operasional meliputi pelatihan teknis medis (seperti pemasangan danpencabutan implant, insersi IUD, pencegahan infeksi, kontap dan lain-lain sesuai kebutuhan) dan pelatihan teknis subtansif yang merupakan jabaran dari kebijakan operasional seperti: UPPKS, pengutamaan gender, pembentukan karakter sejak dini, BKB, KRR, KIP/konseling) dan pelatihan strategis lainnya.

[3] Pelatihan fungsional yang bersifat kompetensi dasar dan kompetensi khusus sesuaikebutuhan daerah (kabupaten dan kota) seperti pelatihan jenjang PKB, pelatihanpimpro, pelatihan penulisan karya ilmiah bagi widyaiswara, dll.

[4] Pelatihan inovatif yang dikembangkan dari jenis-jenis pelatihan yang pernah diselenggarakan sebelumnya seperti Achievement Motivation Training (AMT)

[5] Mengembangkan program operasional spesifik yang dapat digunakan sebagaimodel/media pembelajaran bagi pelatihan internasional (OST-ITP BKKBN)

4. Pembinaan Pengelolaan KeDiklatan

Pembinaan dilakukan oleh Diklat Pusat ke Institusi Diklat Provinsi secara langsung. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas pengelolaan diklat provinsi dan kualitas fasilitasi kediklatan yang diselenggarakan di kabupaten/kota.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam aspek teknis edukatif yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
b. Melakukan pembinaan kualitas proses pembelajaran, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar institusi diklat secara berjenjang dengan perencanaan yang matang.
c. Melakukan pembinaan SDM terutama kepada pejabat struktural institusi diklat manajerialkediklatan untuk meningkatkan kinerja serta motivasi kerja staf

d. Melakukan pembinaan terhadap tenaga fungsional widyaiswara dalam aspek kompetensi, pengembangan karakter dan prestasi melalui berbagai forum dan kegiatan yang difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:
    1) Pengadaan jumlah widyaiswara di tingkat pusat minimal 15 orang dan maksimal 18 orang, sedangkan di provinsi masing-masing minimal 5 orang dan maksimal 7 orang
    2) Pengangkatan widyaiswara disesuaikan dengan persyaratan administratif yang dikeluarkan oleh LAN-RI (SK nomor 810.E/I/10/ 6/2001)
    3) Kompetensi yang harus dimiliki para widyaiswara meliputi bidang-bidang :
        a) Kompetensi dasar tentang bidang teknis kediklatan (manajemen kediklatan dan teknologi pembelajaran)
        b) Kompetensi teknis bidang Kependudukan KB-KR, gender, kepemimpinanan dan manajemen, advokasi dan KIE, pemberdayaan keluarga/pengembangan masyarakat.
        c) Penilaian kegiatan widyaiswara secara berkala untuk memenuhi angka kredit sesuai jenjang kepangkatan yang dilakukan oleh tim penilai angka kredit pusat.

Pemanfaatan TPD/TPK dalam kegiatan internal maupun eksternal BKKBN dalam rangka meningkatkan wawasan terhadap program KB dan kependudukan dan program pembangunan serat bidang disiplin lainnya.

3.2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan sangat berguna untuk mengetahui dan mengukur akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan pendidikan dan pelatihan.

Program Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk TPD/TPK memberikan dampak positif terhadap program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Program Pendidikan dan Pelatihan khususnya program KB yang ditujukan untuk meningkatkan

kinerja pengelola program KB secara keseluruhan relatif sesuai kebutuhan program.

Untuk mengevaluasi hasil diklat ada beberapa aspek yang perlu dicermati sebagai berikut :

1. Nilai aspek akademis merupakan penjumlah nilai post tes sikap dan keterampilan.
   a. Untuk menilai tingkat kemampuan, dilakukan pengukuran dengan menggunakan *instrumen pre test dan post test*, sehingga dapat diketahui prestasi masing-masing.
   b. Untuk menilai sikap, dilakukan pengamatan selama proses pelatihan di kelas.
   c. Untuk menilai keterampilan, dilakukan pengukuran dan pengamatan pada penugasan di kelas.
2. Penilaian terhadap fasilitator dan narasumber difokuskan pada performance pengajar yang mencakup 11 (sebelas) aspek, yaitu :

Tabel 3.2
Penilaian terhadap fasilitator atau narasumber

No	Aspek yang dinilai	Nilai
01.	Sistematika penyajian	79,54
02.	Kemampuan menyajikan/memfasilitasi	79,21
03.	Ketepatan waktu	81,41
04.	Penggunaan metode dan media diklat	78,45
05.	Sikap dan perilaku	82,33
06.	Cara menjawab dari peserta	78,75
07.	Penggunaan bahasa	79,25
08.	Memberikan motivasi kepada peserta	79,66
09.	Penguasaan materi	81,69
10.	Kerapihan berpakaian	82,56
11.	Kerjasama antar fasilitator	80,96
Jumlah		883,81

Rata-rata	80,35

3. Penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan

Penilaian meliputi 9 (sembilan) aspek yaitu :

Tabel 3.3
Penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan

No.	Aspek yang dinilai	Nilai
01.	Efektivitas penyelenggaraan diklat	70,61
02.	Kesiapan dan ketersediaan sarana diklat	71,36
03.	Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana	68,79
04.	Kebersihan kelas, asrama, ruang makan, toilet	72,42
05.	Ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat	69,70
06.	Ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah	67,73
07.	Penggunaan Audio Visual Aids (AVA)	66,67
08.	Pelayanan terhadap peserta	73,64
09.	Ruang perpustakaan dan bahan pustaka	67,88
Jumlah		628,08
Rata-rata		70,00

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian tehadap fasilitator dan narasumber dengan nilai kategori baik, serta penilaian penyelenggaraan diklat juga rata-rata dengan kategori baik.